

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Taiwan yang sekarang secara *de facto* merupakan wilayah Republik Cina pernah menjadi protektorat dari negara Jepang setelah peperangan antara Cina dengan Jepang pada akhir abad ke-19 (1894-1895) yang berbuah pada kekalahan Cina dan perjanjian Shimonoseki berakhirnya masa Perang Dunia II dan Taiwan diambil alih oleh pemerintahan Kuomintang (saat itu, Cina masih berada di bawah Dinasti Qing dari Manchuria, 1895).

Sejarah pemisahan Taiwan dan Cina dimulai dari perang saudara di tahun 1949. Republik Cina yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek yang berhaluan nasionalis kalah dari perang saudara dengan Partai Komunis Cina (Zhongguo Gongchandang) pimpinan Mao Zedong dan mundur ke Taiwan. Mao Zedong kemudian memproklamkan berdirinya negara baru Republik Rakyat Cina di Beiping, yang kemudian diubah namanya menjadi Beijing dan selanjutnya ditetapkan sebagai ibukota negara baru tersebut. Mao Zedong mendeklarasikan Republik Rakyat Cina dan mendirikan sebuah negara komunis.¹

¹ Andrinof A. Chaniago, "Reformasi Strategi Pembangunan: Kisah Sukses Taiwan," <http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=3>, diakses tanggal 2 Juni 2007.

Selanjutnya, pemerintahan nasionalis Kuomintang berpindah dari Cina Daratan karena kalah perang terhadap pasukan komunis, maka Chiang Kai Shek menerapkan sistem pemerintahan darurat dengan asas tunggal satu partai Kuomintang (KMT). Keadaan darurat ini guna mempersiapkan diri dalam merebut kembali daratan Cina. Dalam situasi ini, terjadi pembatasan kegiatan pers politik dan pembungkaman kaum oposisi yang justru banyak berpengaruh di kalangan penduduk Taiwan asli. Keadaan ini berlaku sampai Chiang Kai Shek wafat.²

Sejak Oktober 1949, Taiwan terus berusaha memisahkan diri dari Cina. Usaha yang dilakukan oleh Taiwan yaitu *Pragmatic Diplomacy* yang dijalankan Taiwan memperlihatkan keinginan untuk melepaskan diri dari Cina. Taiwan giat membuka hubungan diplomatik dengan berbagai negara di Afrika ataupun memberi bantuan dana kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diterjemahkan oleh Beijing sebagai keinginan untuk mendirikan negara terpisah.³

Taiwan selanjutnya mencoba kembali untuk menjadi anggota PBB, akan tetapi gagal setiap kali mencoba karena Cina menghalanginya. Cina berusaha mengedepankan Dasar Satu Cina yang dipromosikan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Cina Daratan di samping melakukan tekanan ekonomi dan diplomatik kepada Taiwan. Kebanyakan negara dunia mengubah arah diplomatiknya ke pemerintahan Republik

² *Ibid.*

³ BBC News, "Hubungan Cina-Taiwan", http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/01/070108_chinachenshuibian.shtml, diakses tanggal 4 Juni 2007.

Rakyat di daratan pada tahun 1970-an dan kini, Republik Cina di Taiwan hanya diakui 25 negara saja.

Meskipun Perang Dingin telah selesai, status politik Taiwan terus menjadi suatu isu hangat pada kedua belah selat Taiwan. Taiwan adalah salah satu pendiri utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan salah satu anggota Dewan Keamanan tetap awal. Akan tetapi, pada tahun 1971, Taiwan dikeluarkan dari PBB dan digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok.⁴ Taiwan dikeluarkan karena tidak dianggap sebagai negara yang syah oleh PBB, melainkan bagian dari pada negara Cina.

Setelah Chiang Kai Shek wafat, pemerintahan kepresidenan Taiwan digantikan oleh putranya yang bernama Chiang Ching Kuo sampai beliau wafat pada tahun 1980-an akhir. Pada masa ini *kran* kebebasan pers, politik dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dibuka secara perlahan-lahan. Meskipun masih terobsesi dengan upaya menguasai kembali Cina daratan namun Chiang Ching Kuo berusaha bersikap realistis dengan situasi yang ada. Dia tidak ingin mewarisi pemerintahan yang otoriter. Pada pemilu yang pertama, terpilihlah Lee Teng Hui yang juga dari kalangan partai Koumintang (KMT).

Pada masa pemerintahan Lee Teng Hui, hubungan dengan Cina daratan mulai memanas karena mulai diwacanakannya kemerdekaan bagi Taiwan dengan nama, Taiwan. Taiwan berusaha menuju kemerdekaan dengan cara membangun dukungan internasional melalui hubungan diplomatik.

⁴ Wikipedia, "Ekonomi Taiwan," http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Taiwan, diakses tanggal 3 Januari 2008.

Selain menggalang dukungan dari kalangan internasional, Taiwan juga memantapkan dukungan dari negara-negara yang masih menjalin dukungan dengan Taiwan yang saat itu berjumlah 30 negara termasuk Afrika Selatan. Namun *tamparan* diplomatik diperoleh Taiwan ketika Afrika Selatan akhirnya memindahkan hubungan diplomatiknya ke RRC pada tahun 1997.

Cina memiliki kepentingan nasional sehingga Cina menghalang-halangi Taiwan untuk memerdekakan diri. Kepentingan nasional merupakan tujuan nasional yang dijadikan dasar dan penentu utama yang menjadi pemandu para pembuat kebijakan dalam menentukan politik luar negeri satu negara dengan negara lain serta berbeda-beda sasaran yang hendak dituju, namun biasanya berkisar pada *self preservation, independence, military security, territorial integrity* dan *economic well being*.⁵

Cina merasa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya sehingga kepentingan Cina mempertahankan Taiwan adalah demi *territorial integrity*. *Territorial integrity* atau integritas territorial merupakan salah satu aspek utama dari kepentingan nasional yang bertautan dengan upaya mempertahankan wilayahnya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi RRC untuk Mencegah Taiwan Memperoleh Kemerdekaannya”.

⁵ Republika, “Belajar dari ‘Macan Industri’ Dunia,” <http://www.pks-anz.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=703>, diakses tanggal 3 Juni 2007.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diangkat pokok permasalahan: strategi apa yang digunakan oleh RRC untuk mencegah Taiwan memperoleh kemerdekaannya?

C. Kerangka Pemikiran

Konsep *Hard and Soft Power*

Setiap negara pasti akan berusaha mempertahankan wilayahnya dari keinginan wilayahnya untuk memerdekakan diri serta dari ancaman ataupun gangguan negara lain. Upaya untuk mempertahankan tersebut dapat dilakukan dengan *soft power* juga *hard power*. *Soft power* didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan dengan cara persuasif atau diplomasi sedangkan *hard power* didefinisikan sebagai usaha melalui militer.⁶

Soft power dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh tujuan tertentu dengan cara memberikan penyadaran kepada pihak lain untuk sama-sama mencapai suatu keuntungan. *Hard Power* merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh tujuan tertentu dengan cara melakukan tekanan kepada pihak lain.⁷

Soft power berarti bahwa pendekatan yang dilakukan oleh negara tersebut dengan melakukan komunikasi secara intensif dengan negara lain dan mengadakan suatu dialog agar timbul saling pemahaman. *Soft power* yang

⁶ Trevor N Dupuy, *International Military and Defense Encyclopedia*, Vol. 5.

⁷ Varma, *Teori Politik Modern*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hal.22.

diterapkan melalui diplomasi biasanya merupakan tahap awal yang dilakukan suatu negara sebelum melakukan *hard power*. *Hard power* berarti penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Diplomasi adalah penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat. Diplomasi merupakan seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.⁸ Diplomasi sangat erat bila dihubungkan dengan hubungan antar negara. Diplomasi merupakan seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain.

Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tindakan nyata dari politik luar negeri adalah diplomasi negosiasi. Diplomasi negosiasi merupakan tindakan yang diambil dengan melakukan perundingan yang didalamnya terdapat “tawar-menawar” untuk saling bekerja sama demi mendapat keuntungan yang akan diperoleh pihak-pihak yang melakukan perundingan tersebut.⁹

Dalam formulasi umumnya, istilah keamanan lebih dari sekedar pertimbangan militer. Keamanan dapat difahami baik sebagai sebuah upaya mempertahankan atau melawan ancaman-ancaman eksternal ataupun internal

⁸ S.L. Roy, *Diplomasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, Hal.3.

⁹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi IX, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1991, Hal.38.

dan juga sebagai bentuk kesejahteraan umat manusia dalam sebuah masyarakat. Dalam membahas kebijakan pertahanan sebuah negara memiliki kesamaan istilah dengan keamanan, dimana pertahanan merupakan komponen dari keamanan itu sendiri.¹⁰ Sebagai contoh, pertahanan merupakan kontribusi untuk keamanan dalam upaya mencegah atau membatasi lawan serta mengurangi lawan melakukan serangan.

Kebijakan pertahanan atau *defense policy* adalah sebuah proses dinamik yang difahami dengan mempelajarinya dari beberapa dimensi berbeda. Samuel Huntington menyatakan bahwa kebijakan mempertahankan eksis baik dalam politik internasional maupun politik domestik.¹¹ Pada saat yang sama, hal tersebut melibatkan sebuah ancaman yang seringkali muncul dalam lingkungan politik, ekonomi internasional serta mendapat respon dalam lingkungan domestik atau nasional. Glenn Synder menjelaskan bahwa kebijakan mempertahankan melibatkan dua konsep yaitu deterens (*deterrence*) dan defens(*defense*).¹²

Pada dasarnya deterens berarti mengurangi upaya musuh untuk melakukan tindakan militer dengan mengurangi kemungkinan biaya dan resiko musuh lebih besar daripada kemungkinannya sendiri. Defens berarti mengurangi biaya dan resikonya sendiri ketika situasi deterens mengalami kegagalan. Deterens berfungsi untuk menghalau tercapainya tujuan-tujuan

¹⁰ James N. Rossenau, *International Politics and Foreign Policy*, Free Press, New York, 1969, hal. 57.

¹¹ *Ibid*, hal. 58.

¹² Douglas J. Murray dan Paul R. Viotti, *The Defense Policies of Nations*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1994, hal.2.

musuh. Nilai deterens dari kekuatan militer adalah pengaruhnya dalam mengurangi kemungkinan gerakan militer musuh. Defens mengurangi kemampuan musuh untuk menghancurkan dan memusnahkan suatu negara, nilai mempertahankan dari kekuatan militer adalah pengaruhnya dalam mengurangi akibat-akibat yang merugikan, apakah akibat tersebut berupa kehilangan sebuah wilayah atau kerusakan akibat perang. Perbedaan mendasar antara deterens dan defens adalah bahwa deterens merupakan sebuah tujuan dalam suasana damai sementara defens dalam suasana perang.¹³

Kebijakan mempertahankan dapat didefinisikan sebagai kumpulan rencana, program, dan kegiatan yang diambil oleh suatu negara untuk mencapai keamanan melawan ancaman militer lain, dan melawan pemberontakan domestik. Kebijakan mempertahankan membantu mempertahankan negara dalam usaha mendapatkan dan membangun sumber-sumber mempertahankan.

Setiap negara dapat dipastikan memiliki kebijakan mempertahankan. Kebijakan mempertahankan tersebut bertujuan untuk menjaga keutuhan negaranya atau mempertahankan integritas teritorinya.¹⁴ Steven L Spiegel mengungkapkan tiga tipe strategi yang dapat digunakan dalam rangka mempertahankan dan integritas teritorinya yaitu:¹⁵

¹³ *Ibid*, hal. 3.

¹⁴ Coplin D. William, Marsedes M., *Pengantar Politik Internasional*, Sinar Baru, Bandung, 2003, hal. 75.

¹⁵ Steven L. Spiegel, *World Politics in a New Era*, Harcourt Brace College Publisher, New York, 1995, hal. 506-509.

1. *Deterrence*

Menurut Spiegel, deterens (*deterrence*) merupakan upaya suatu negara untuk mencegah terjadinya perang dengan cara membuat pihak lawan untuk tidak melakukan perlawanan. Hal ini yang lebih penting lagi bahwa negara yang bertahan (*defender*) harus dapat menunjukkan komitmen serta kapabilitasnya untuk menghukum pihak lawan dengan jalan mendemonstrasikan kredibilitas dari *deterrent threat* tersebut.

Menurut kerangka waktunya (*time frame*), *deterrence* dapat dibedakan kedalam dua tipe yaitu:

- a. *General Deterrence*, merupakan strategi jangka panjang yang digunakan untuk melemahkan pertimbangan-pertimbangan serius yang dimiliki pihak lawan.
- b. *Immediate Deterrence*, merupakan suatu respon atau tanggapan dari negara yang bertahan terhadap tantangan yang sifatnya spesifik dan eksplisit yang berasal dari pihak lawan. Bentuk deterens ini dapat digunakan untuk menghentikan apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi.

Sementara menurut Holsti, *deterrence* merupakan upaya para pembuat keputusan dari suatu negara untuk mencegah tindakan-tindakan tertentu yang dapat dilakukan pihak lawan dengan mengancam mereka dengan pembalasan militer.¹⁶

¹⁶ Holsti, K.J., *Internasional Politics: A Framework for Analysis?*, 6 th Ed, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1992, hal. 235.

2. *Defense*

Defense merupakan upaya untuk mengurangi kapabilitas lawan yang berupaya merusak atau mengambil teritorinya, sumber daya atau sumber berharga lainnya yang dimiliki oleh negara. Tujuan utama dari mempertahankan ini adalah menahan suatu serangan dalam rangka meminimalisasi kerugian apabila *deterrence* yang telah dilakukan gagal.

Apabila *deterrence* cenderung bersifat psikologis dan berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak lawan, *defense* cenderung bersifat fisik dan berusaha untuk menolak dengan tegas apapun yang dilakukan oleh pihak lawan.

3. *Compellence*

Apabila upaya *deterrence* dan *defense* gagal dilakukan sehingga terjadi suatu serangan, negara akan meyakinkan pihak lawan untuk menarik kekuatannya dengan cara membalas tindakan yang telah dilakukan pihak lawan tersebut. Strategi *compellence* ini pada dasarnya sangat sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan *deterrence* karena negara yang melakukan tindakan *compellence* harus meyakinkan pihak lawan untuk mundur atau menyerah.

Dalam upaya mempertahankan Taiwan agar tidak memperoleh kemerdekaannya, maka strategi mempertahankan yang digunakan oleh Cina adalah strategi deterens, yang meliputi *soft power* dan *hard power*. *Soft power* yang dilakukan oleh Cina adalah dengan membujuk melalui pendekatan diplomasi dan mensyahkan undang-undang anti pemisahan.

Hard power yang dilakukan Cina dengan melakukan ancaman serta manuver politik. Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari Cina sehingga mengancam akan menggunakan kekerasan jika pulau itu berusaha mendeklarasikan kemerdekaannya. Manuver militer yang dilakukan Cina terhadap Taiwan adalah dengan mengadakan latihan militer, dan mempersiapkan militernya untuk melakukan penyerangan terhadap Taiwan apabila Taiwan tidak menghiraukan ancaman Cina.

Strategi Cina dengan menggunakan pendekatan diplomasi misalnya dengan usaha Cina membujuk Taiwan dengan memberikan kelonggaran kepada Taiwan dengan semboyan Satu Tiongkok dua Sistem (*Republic-People Republic of Cina*) dengan pilot proyek diterapkannya sistem itu di Hong Kong dan Makau ditambah dengan komunikasi politik dengan tokoh oposisi Taiwan dan rekonsiliasi politik antara Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Nasionalis (Kuomintang). Selain itu Cina membentuk dewan penasihat penyatuan. Namun, dewan tersebut dibubarkan oleh Taiwan. Cina “mengutuk” tindakan Presiden Taiwan Chen Chui-bian membubarkan dewan penasihat penyatuan.¹⁷

Pemerintah Cina untuk pertama kalinya bersikap keras atau mengancam dalam upayanya membujuk Taiwan membahas reunifikasi di antara mereka. Dalam pernyataan 21 Februari 2002, Cina secara eksplisit menegaskan bahwa Taiwan akan menghadapi kemungkinan perang jika

¹⁷ Suara Merdeka, “Cina Kutuk Provokasi Taiwan,” <http://www.suaramerdeka.com/harian/0603/01/int04.htm>, diakses tanggal 2 April 2008.

kembali menolak upaya reunifikasi melalui meja perundingan.¹⁸ Peringatan keras Cina ini tertuang dalam "buku putih" atau *white paper* pada tahun 2002 yang berisi 11.000 kata yang dikeluarkan Dewan Negara alias kabinet Cina. "Jika otoritas Taiwan menolak penyelesaian damai reunifikasi melalui perundingan, maka Pemerintah Cina terpaksa melakukan berbagai langkah drastis yang memungkinkan, termasuk menggunakan kekuatan," ujar Cina sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua.¹⁹

Hal penting lain yang harus diperhatikan agar strategi deterens ini berhasil adalah dengan "menghindari" terjadinya persepsi yang salah (*misperception*) yang diterima oleh pihak lawan. Kemungkinan ini bisa saja terjadi dimana pihak lawan meremehkan kapabilitas militer dan negara atau pihak yang dilawannya. Maka dari itu, deterens tergantung pada kejelasan komunikasi, informasi, serta ketepatan persepsi yang diterima oleh, baik hanya salah satu maupun kedua pihak.²⁰

Untuk mendukung hal tersebut, maka Cina mengedepankan *One country two system* yang selanjutnya diperkuat dengan adanya undang-undang anti pemisahan. Undang-undang anti pemisahan adalah sebuah undang-undang (UU) No.34 tahun 2005 yang disetujui pada rapat ketiga Kongres Rakyat Negara ke-10 Republik Rakyat Cina. Undang-undang tersebut diratifikasi pada tanggal 14 Maret 2005, sehingga mulai berlaku setelahnya.

Dengan demikian, selain strategi yang digunakan sebelum *hard power* yaitu

¹⁸ Kompas, "Cina Siap Gempur Taiwan," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/9907/17/ln/cina20.htm>, diakses tanggal 3 Juni 2007.

¹⁹ Kompas, "Cina Ancam Perang terhadap Taiwan," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0002/22/ln/cina03.htm>, diakses 5 Mei 2007.

²⁰ *Ibid.*, hal. 516.

melalui militer juga adalah dengan melalui *soft power* yaitu adanya diplomasi yang ditunjang dengan pengesahan undang-undang anti pemisahan untuk menunjang *soft power* yang ada.

Hipotesis

Melihat pada hubungan RRC-Taiwan, RRC menggunakan strategi, yaitu:

- a. Menggunakan *soft power* dengan membujuk atau menggunakan pendekatan diplomasi agar Taiwan tidak memerdekakan negaranya. Selain itu, Cina juga mensyahkan suatu undang-undang yang dinamakan undang-undang anti pemisahan sebagai upaya mendukung strategi *soft power* yang dilakukan Cina terhadap Taiwan.
- b. Menggunakan *hard power* dengan melakukan ancaman akan menggunakan kekuatan militer jika Taiwan meneruskan niat untuk memproklamirkan kemerdekaannya dari Cina Daratan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap buku, literatur, makalah, kliping koran atau majalah, jurnal ilmiah, dokumen laporan tahunan yang diterbitkan oleh suatu instansi atau badan pemerintah yang mengkaji masalah

internasional dan sumber yang dianggap resmi, kemudian dianalisa, bagaimana tiap variabel berhubungan satu sama lain.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami strategi *soft power* yang digunakan oleh RRC untuk mencegah Taiwan memperoleh kemerdekaannya.
2. Memahami strategi *hard power* yang digunakan oleh RRC untuk mencegah Taiwan memperoleh kemerdekaannya.

F. Jangkauan Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan mulai tahun 2000 dimana Cina mulai melakukan ancaman pada Taiwan jika Taiwan menginginkan kemerdekaan, hingga 2006. Walaupun begitu data-data sebelum tahun 2000 dan sesudahnya tahun tersebut tetap menjadi sumber data penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Seluruh skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, serta sistematika penulisan. Bab kedua membahas mengenai sejarah berdirinya Taiwan, pemerintahan dan politik, serta perekonomian Taiwan.

Bab ketiga ini akan menguraikan strategi *soft power* yang dilakukan Cina. Selain itu, membahas adanya Undang-Undang Anti Pemisahan yang digunakan Cina sebagai pendukung strategi *soft power* dan pengaruhnya bagi Taiwan. Bab keempat membahas tentang strategi *hard power* yang digunakan RRC terhadap Taiwan untuk mencegah Taiwan memperoleh kemerdekaannya. Adapun bab kelima berisi tentang kesimpulan dari penelitian.